

## REVIEW BUKU YUDI LATIF “YANG LAJU DAN YANG LAJU” (MEMBUMIKAN AGAMA DALAM KRISIS RUANG PUBLIK)

**Prisca Kiki Wulandari**  
*Pusat MPK Universitas Brawijaya*  
*Surel: priscakiki@ub.ac.id*



Buku terbaru yang ditulis oleh Yudi Latif dengan judul “*Yang Laju dan Yang Layu (Membumikan Agama dalam Krisis Ruang Publik)*”, ditujukan bagi pembaca di seluruh tanah air yang saat ini sedang mengalami krisis dalam memaknai agama ketika ditampilkan dalam kehidupan bernegara. Pemandangan yang sangat tidak indah dan etis ketika negeri ini dilanda masalah dan belum selesai mengatasinya kemudian sudah dilanda masalah baru. Di sisi lain, pada level pemerintahan yang terjadi adalah pergulatan antara pemerintah dan parlemen yang bekerja sama mengkhianati rakyatnya dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Buku ini merupakan kumpulan tulisan (*esai* dan makalah) dari Yudi Latif yang kemudian dibukukan. Buku ini terdiri dari tiga bagian dimana setiap bagian terdiri dari lima bab, yakni bagian pertama membahas tentang “Islam dan Demokrasi: Tegangan antara Masyarakat Politik dan Masyarakat Sipil. Bagian II membahas tentang “Krisis Ruang Publik dan Kebebasan: Tegangan antara Toleransi dan Fanatisme. Bagian ketiga membahas tentang: Reformasi Kepemimpinan dan Kapital Moral: Tegangan antara Politik Elite dan Etika Politik”.

Bagian pertama dalam buku ini membahas lebih dalam mengenai peran politik umat Islam dalam proses demokratisasi di Indonesia. Transisi demokra-

si dan reformasi adalah kesempatan untuk menumbuhkan nilai-nilai demokrasi serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik. Proses demokrasi dapat berjalan dengan baik jika disokong oleh *civil society* yang kuat. Demokrasi dan *civil society* bagaikan dua sisi mata uang yang saling mendukung. Nilai-nilai Islam merupakan inspirasi untuk menciptakan keadaan politik sehingga dapat digunakan sebagai penyokong tumbuhnya masyarakat politik dan masyarakat sipil. Adapun fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Islam kepada umatnya untuk mengembangkan diri sebagai masyarakat yang demokratis, antara lain; *pertama*, sebagai agama transendentalis yang sangat berpegang teguh pada keimanan “tauhid” (keesaan dan kemahakuasaan Tuhan), Islam memberikan kepada manusia otoritas yang lebih tinggi dan suatu tempat untuk mengadu yang lebih canggih di atas lembaga masyarakat yang telah mapan. *Kedua*, Islam memosisikan manusia sebagai *khalifatullah*, Islam menghubungkan manusia dengan Allah sehingga meningkatkan otonomi dan martabat individu, dengan membuat individu tersebut lebih dari sekedar anggota masyarakat. Ketiga, penekanan Islam terhadap pertanggung jawaban pribadi atau sering disebut etika pengendalian diri mengembangkan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. *Keempat*, doktrin *rahmatan lil 'alamin* yang mendukung semangat universalisme dan persaudaraan insani. *Kelima*, prinsip *syura* (musyawarah) yang dianjurkan Islam dalam mekanisme pengambilan keputusan, memberi manusia semangat saling mengoreksi, saling memberi, dan saling menghargai. *Keenam*, sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Islam sangat mengutuk konsentrasi barang dan nilai-nilai langka pada sekelompok masyarakat kecil yang bisa memicu merajalelanya tirani minoritas. *Ketujuh*, dalam konteks Indonesia, peran kesejahteraan dan mayoritas Islam merupakan yang menentukan tercapainya cita-cita demokrasi. Sangat disayangkan kapasitas-kapasitas demokrasi dalam Islam masih sebatas tekstual. Terlalu kuatnya masyarakat politik dalam menjangkau dan mengendalikan masyarakat sipil yang tidak ditopang oleh semangat demokrasi Islam.

Pada level pragmatis demokrasi dipandang sebagai tujuan yang harus dicapai dan bukan sarana untuk mencapai tujuan. Para pemimpin elite negeri ini sudah merumuskan tujuan mulai jangka panjang dengan demokrasi sebagai sarannya, tetapi lupa untuk merumuskan tujuan-tujuan jangka menengah yang harus dilalui terlebih dahulu. Permasalahan yang selalu muncul dalam sejarah hingga sekarang belum bisa diselesaikan yakni pluralitas masyarakat Indonesia. J.S. Furnivall mencirikan masyarakat plural sebagai masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup berdampingan, tanpa melebur dalam satu unit politik, sehingga tidak ada kehendak bersama kecuali jika ada perkara mendesak seperti melawan agresi dari luar.

Bagian kedua, atau bab enam hingga sembilan membahas lebih dalam tentang isu-isu yang berkaitan tentang kebebasan ruang publik ke-Indonesiaan. Bagaimana budaya kekerasan dan fanatisme telah menghalangi tumbuhnya ruang publik yang demokratis dan berkeadaban. Sehingga perlu peneguhan sikap partisipasi dan toleransi. Demokrasi harus dimaknai sebagai kesetaraan. Kesetaraan pada hakikatnya mengandaikan terciptanya kebebasan. Berdasarkan pengala-

man, setiap konflik terjadi karena adanya ketidaksetaraan. Faktor kebebasan dan persamaan merupakan faktor hakiki dalam demokrasi, tetapi tentunya kebebasan yang bertanggung jawab dan bukan kebebasan yang sesuka hati yang tidak tahu aturan. Ironisnya, yang terjadi di negeri ini kebebasan yang sesuka hati atau yang sering disebut fanatisme. Kebebasan yang mengingkari bahwa Indonesia adalah plural sehingga harus bertoleransi. Serangkaian kekerasan yang terjadi beberapa tahun terakhir merupakan efek dari fanatisme dan miskinnya budaya toleransi. Ketika fanatisme menolak perbedaan pandangan, memusuhi keberagaman dalam keagamaan sikap toleransilah yang harus disemai dan diteguhkan karena solusi dari semua permasalahan.

Bagian ketiga atau bab sepuluh hingga lima belas membahas persoalan-persoalan riil yang dihadapi Indonesia pascakolonial, seperti kemerdekaan tanpa terciptanya rasa keadilan dan kesejahteraan, pembaruan politik yang seakan menemui jalan buntu, dan kepemimpinan politik yang tanpa ditopang kapital moral. Kapital moral merupakan kekuatan dan kualitas komitmen pemimpin dalam memperjuangkan nilai-nilai, keyakinan, tujuan, dan amanat penderitaan rakyat. Kapital moral yang dibutuhkan sebagai pemimpin bukan hanya pretensi kebaikan dari kehidupan politik Indonesia sedang mengalami miskin keteladanan dan kepemimpinan. Kehidupan publik politik menuntut calon-calon pemimpin melakukan revolusi mental, baik di level personal elite politik (khususnya bagi calon-calon pemimpin politik di tingkat lokal dan nasional), serta revolusi di tingkat struktural karena budaya feodalisme dalam perilaku birokrasi dan praktik administrasi negara yang sangat tidak efisien. Misalnya saja para pejabat publik yang seharusnya menjadi pelayan publik, tetapi mereka ingin dilayani oleh publik. Untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut maka diperlukan kepemimpinan dengan kapital moral.

Terdapat dua hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan tujuan negara yang adil dan sejahtera, yang pertama: *nation building* dan *state building*. Namanya hingga saat ini Indonesia masih sibuk dengan *nation building*, sehingga melupakan tugas keduanya. Ketika usaha untuk melawan penjajah dimotori oleh semangat *nation building*, kita seakan melupakan bahwa setelah merdeka warisan penjajah lewat tata kelola kenegaraan menyusup lewat pintu belakang republik, melanggengkan struktur-struktur ketidakadilan yang menyulitkan perwujudan sosionasionalisme dan sosiodemokrasi. Hal ini menjadi catatan bahwa setelah 72 Indonesia merdeka, masih saja sebagai proyek yang belum tuntas.

Semangat proklamasi merebut kemerdekaan di tahun 1945 telah berhasil mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mempunyai kehendak bersama yakni kemerdekaan. Tiap-tiap orang dan organisasi mengesampingkan kepentingan pribadinya atau kepentingan partai atau organisasinya. Semangat idealisme tersebut secara perlahan dimatikan oleh rezim orde baru yang semakin hari mengajarkan untuk bersikap pragmatis. H.G. Wells mengatakan bahwa anasir terpenting yang menentukan nasib suatu bangsa adalah kualitas dan kuantitas tekad yang dimilikinya. Semangat idealisme Indonesia yang sudah terbangun sejak awal proklamasi, semakin surut dengan kepentingan-kepentingan sempit yang partikular. Dibentuknya partai politik dengan tujuan mengakomodir aspirasi, tetapi

ternyata terpasung oleh ambisi-ambisi elit. Hal ini tentu saja mengakibatkan terselenggaranya demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi yang memicu api dalam sekam, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk membakar ikatan-ikatan persatuan. Di samping itu, perilaku para elite yang tidak bisa bertindak sebagai negarawan dan memberi ketedelanan. Menjadi seorang elite atau pemimpin seharusnya mempunyai idealisme dan mental baja. Seperti yang dikemukakan oleh Soekarno bahwa :“Pemimpin tidak berubah karena hukuman. Saya masuk penjara untuk memperjuangkan kemerdekaan, dan saya meninggalkan penjara untuk pikiran yang sama.”

Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Mohammad Hatta, bahwa pemimpin yang suci senantiasa terjauh dari godaan, terutama godaan duniawi. Ketetapan hati dan keteguhan iman merupakan syarat utama untuk menjadi pemimpin. Kalau ia tidak mempunyai moral yang kuat maka tidak akan dapat memenuhi kewajiban dan menghindari pergerakan. Komitmen moral yang dipegang tersebut mampu berempati dengan suasana kebatinan rakyat. Ia mampu menduga perasaan rakyat dan memberikan jalan keluar. Kehendak berempati dari para pemimpin Indonesia tercermin dalam konsensus pembentukan negara Indonesia, yakni ketika para pendiri bangsa kita bersepakat membentuk negara kekeluargaan yang tercermin dalam konstitusi Indonesia. Soepomo juga mengingatkan bahwa yang terpenting dari sebuah konstitusi adalah semangat pemimpinnya. Meskipun konstitusi tersebut tidak sempurna tetapi apabila semangat penyelenggara negara dan pemimpinnya baik maka tidak akan menghalangi untuk menyelenggarakan negara yang adil dan makmur sesuai visi negara kekeluargaan.

Terdapat empat sumber utama bagaimana menjadi seorang penyelenggara negara atau pemimpin yang mampu mengembangkan, menjaga, dan memobilisasi moral kapital yakni: (1) basis moralitas, menyangkut nilai-nilai, tujuan, serta orientasi politik yang menjadi komitmen dan dijanjikan pemimpin politik kepada konstituennya; (2) tindakan politik, menyangkut kinerja pemimpin dalam menerjemahkan nilai-nilai moralitasnya kedalam ukuran-ukuran perilaku, kebijakan, dan keputusan politiknya; (3) keteladanan, menyangkut contoh perilaku moral yang konkrit dan efektif yang menularkan kesan otentik serta kepercayaan kepada komunitas politik; (4) komunikasi politik, kemampuan seorang pemimpin untuk mengkomunikasikan gagasan serta nilai-nilai moralitas dalam bentuk bahasa politik yang efektif, yang mampu memperkuat solidaritas dan moralitas masyarakat. Dari keempat hal tersebut kita dapat menakar kualitas *moral capital* dari para politisi dan aparaturnegara.

Kepemimpinan dengan kapital moral belum menjadi budaya bagi bangsa Indonesia. Dapat kita cermati opini publik diarahkan oleh pers. Siapa yang akan diusung menjadi pemimpin maka pers melakukan pencitraan yang baik-baik terhadap calon tersebut. Munculnya ia sebagai calon juga karena adanya *invisible hand* yang entah darimana asalnya serta kriteria apa yang dipunyai oleh si calon tersebut, tiba-tiba pers selalu meliput si calon mendekati pesta demokrasi. Dan seakan-akan rakyat tidak mau tahu dan tidak mempertanyakan hal tersebut. Mereka seperti mengikuti opini yang dicitrakan oleh media-media. Jika orang tersebut baik, maka harus dipilih, bukan menyelidiki dari mana asalnya, bagaimana

*track recordnya* di pemerintahan, bagaimana pengetahuannya tentang pemerintahan, dan sebagainya. Ujung-ujungnya ketika si calon telah terpilih, kemudian tersangkut kasus korupsi, rakyat mulai menyesal telah memilihnya.

Misi besar reformasi untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme masih jauh dari harapan. Proses konsolidasi demokrasi terhambat oleh proses demokratisasi korupsi. Praktik korupsi melanda seluruh lembaga dan instansi kenegaraan, serta merembes dari pusat hingga daerah. Cerminkan-cerminan tersebut semakin menunjukkan kepada generasi muda citra pemerintahan yang buruk (pemerintah gagal membangun citra positif di mata rakyat). Kegagalan ini juga bukan malah menjadi pembelajaran para penyelenggara negara untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, tetapi mereka tidak mepedulikan hal tersebut dan tetap mencari keuntungan pribadi “mumpung” masih punya kesempatan sebagai penguasa. Demokrasi pada masa reformasi telah mendatangkan surplus kebebasan tetapi belum kunjung mendatangkan surplus kebahagiaan dan keadilan. Padahal kriteria suatu negara disebut sebagai negara ideal, jika mampu memberikan kebahagiaan kepada rakyatnya. Survei yang dilakukan di 50 negara, ukuran kebahagiaan tersebut bukan berasal dari persoalan alam dan kualitas perseorang, tetapi lebih kepada kualitas pemerintahan. Pengaruh kualitas pemerintahan terhadap kebahagiaan hidup warga negaranya jauh melampaui efek yang ditimbulkan dari pendidikan, pendapatan, dan kesehatan, yang kesemuanya tergantung pada kualitas pemerintahan.

Usaha demokrasi yang mampu membawa kebahagiaan menuntut penjelmaan “negara-pelayan”. Basis legitmasi negara pelayan bersumber pada empat jenis responsibilitas, yaitu perlindungan, kesejahteraan, pengetahuan, dan keadilan. Sebenarnya para *founding fathers* Indonesia telah merumuskan tujuan negara, sebagai negara pelayan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Sangat disayangkan tujuan yang cemerlang sebagai negara pelayan tersebut terganjal para pemimpin dengan defisit kapital moral yang saat ini membanjiri negeri ini.

